

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan ekonomi, salah satunya adalah kemiskinan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global yang hingga saat ini belum sepenuhnya teratasi. Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Hardinandar, 2019). Selain itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang menyebabkan rendahnya kualitas hidup masyarakat.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian dunia internasional, yang ditandai dengan lahirnya deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000, dengan salah satu target utama yaitu menurunkan jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Namun, target tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga agenda pembangunan global kemudian dilanjutkan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015. Program yang diinisiasi oleh *United Nations* ini mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersifat inklusif, di mana pengentasan kemiskinan (Goal 1) memiliki keterkaitan erat dengan kesetaraan gender (Goal 5) serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8).

Perspektif ekonomi pembangunan, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Keterbatasan pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap peluang ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja (Clarke & Erreygers, 2020; Ravallion, 2020; Wang et al., 2020). Rendahnya produktivitas ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan dan memperbesar kemungkinan seseorang untuk berada dalam kondisi miskin.

Faktor yang turut memengaruhi rendahnya produktivitas adalah ketimpangan gender. Perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh

pendidikan, pekerjaan, serta kesempatan ekonomi lainnya menyebabkan perempuan seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kondisi ini menciptakan diskriminasi yang berdampak pada terbatasnya kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus (Amani et al., 2020; Brady, 2019; Kola & Owumi, 2019; Waheed Olowa, 2012).

Kesetaraan gender telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Klasen & Lamanna, 2009). Sebaliknya, peningkatan kesetaraan gender mampu mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara empiris, kondisi kesetaraan gender di Indonesia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. IPG mencerminkan kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sedangkan IDG menggambarkan tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan. Meskipun kedua indikator ini menunjukkan tren yang meningkat, ketimpangan gender masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia relatif seimbang, namun hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam partisipasi ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja perempuan belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, partisipasi perempuan dalam pasar kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Kondisi ketimpangan partisipasi ekonomi secara nasional tersebut pada kenyataannya juga terefleksi dengan dinamika yang unik di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data empiris dari Badan Pusat Statistik (BPS), capaian Indeks

Pembangunan Gender (IPG) di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan secara umum telah berada pada kategori yang sangat baik dan terus mengalami tren peningkatan yang positif. Namun ironisnya, keberhasilan dalam menutup kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan dasar ini tidak serta-merta bertransformasi menjadi pemerataan di sektor pemberdayaan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat fluktuasi yang cukup tajam pada angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan antar wilayah kabupaten/kota setiap tahunnya.

Provinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik struktur ekonomi yang secara historis sangat ditopang oleh sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan, di mana sektor-sektor tersebut secara demografis didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Di tengah transisi pembangunan inklusif menuju capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), fluktuasi tingkat kemiskinan di provinsi ini yang terjadi bersamaan dengan naikturunnya partisipasi kerja perempuan mengindikasikan adanya sebuah anomali struktural. Masuknya perempuan ke dalam pasar kerja diduga belum sepenuhnya berkorelasi dengan peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi representasi wilayah yang sangat relevan dan mendesak untuk diteliti guna membuktikan secara empiris sejauh mana variabel kesetaraan gender benar-benar beresonansi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan pengentasan kemiskinan.

Fenomena anomali struktural ini semakin diperkuat oleh realitas ketenagakerjaan di lapangan yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi kerja perempuan di Kalimantan Selatan belum berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan data dan publikasi Profil Tenaga Kerja dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, struktur penyerapan tenaga kerja perempuan masih sangat didominasi oleh sektor informal, yakni menyentuh angka 66,62 persen, dibandingkan sektor formal yang hanya sebesar 33,38 persen. Lebih memprihatinkan lagi, porsi yang sangat besar dari pekerja perempuan tersebut berstatus sebagai pekerja keluarga atau pekerja yang tidak

dibayar secara layak. Realitas paradoksal ini sejalan dengan temuan empiris terbaru yang menyoroti bahwa masuknya perempuan ke pasar kerja seringkali bukan wujud dari pemberdayaan ekonomi atau peningkatan kapasitas diri, melainkan murni sebagai *survival strategy* (strategi bertahan hidup) dalam merespons himpitan kemiskinan keluarga (Gusrifa et al., 2025; Shintiya et al., 2025).

Keterbatasan akses terhadap pelatihan formal, kuatnya budaya patriarki di beberapa daerah, serta rendahnya penyerapan perempuan di sektor-sektor unggulan daerah memaksa mereka mengambil pekerjaan rentan (*vulnerable employment*) dengan standar upah yang minim. Oleh karena itu, wajar jika secara statistik, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di wilayah ini belum mampu memutus rantai kemiskinan, melainkan justru menjadi indikator tingginya tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga itu sendiri.

Namun demikian, penelitian sebelumnya umumnya masih menganalisis pengaruh kesetaraan gender terhadap kemiskinan secara langsung tanpa mempertimbangkan mekanisme mediasi yang terjadi melalui partisipasi angkatan kerja perempuan. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya menggunakan satu indikator kesetaraan gender, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi gender secara komprehensif. Padahal, kesetaraan gender merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek, seperti capaian pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

Keterbatasan lainnya adalah penggunaan data yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini, terutama setelah terjadinya perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menggunakan data terbaru serta pendekatan analisis yang lebih komprehensif untuk memahami hubungan antara kesetaraan gender, partisipasi ekonomi perempuan, dan kemiskinan.

Berdasarkan pembahasan diatas tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu: (1) belum banyak penelitian yang mengkaji peran partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kesetaraan gender dan kemiskinan; (2) masih terbatasnya penggunaan

indikator kesetaraan gender yang bersifat multidimensional, seperti kombinasi IPG dan IDG; serta (3) perlunya penggunaan data panel terbaru untuk menangkap dinamika ekonomi dan sosial secara lebih akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan peran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami hubungan antara kesetaraan gender, partisipasi ekonomi perempuan, dan kemiskinan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?
6. Bagaimana peran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan dalam memediasi pengaruh Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Menganalisis pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Menganalisis pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Menganalisis peran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan memberikan kontribusi khususnya pada aspek ketimpangan gender, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang kemiskinan dengan mengintegrasikan ketimpangan gender pendidikan, partisipasi angkatan kerja perempuan, dan pertumbuhan ekonomi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Pendekatan ini penting, karena bertujuan untuk menutup celah penelitian sebelumnya yang membahas variabel-variabel

tersebut secara terpisah dan belum saling dihubungkan.

2. Empiris

Penelitian ini memberikan bukti terbaru mengenai perkembangan kemiskinan di Indonesia pada periode 2015-2024. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pengaruh simultan variabel-variabel utama terhadap penurunan tingkat kemiskina di Indonesia.

